

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA
DI “KAMPUNG KB” DESA SUNGAI CAMBAI KECAMATAN MESUJI TIMUR
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2016**

Jamal Jamal, Sri Harti

ABSTRACT

The problems faced by several developing countries today are reducing the amount of poverty and increasing the welfare of the community by using various methods, both through improving economic infrastructure such as building roads, bridges, markets and other facilities, as well as building the degree and participation of the community through improving education and health and - government programs in terms of improving community welfare. Law Number 52 of 2009 concerning population development and a Prosperous Family is a solid foundation in controlling the population and the development of Indonesian families towards a balanced growing population and creating a happy and prosperous small family.

The focus and location of this research is on the Implementation of the Prosperous Family Program in Kampung KB, Sungai Cambai District, which aims to examine the implementation of the Prosperous Family program as well as knowing and analyzing the factors that influence policy implementation. With a phenomenological approach, using qualitative methods, the researcher concludes that policy implementation has been good but there is still something that needs to be improved. Inhibiting factors for implementing a prosperous family program include resources, the degree of change desired, the position of policy makers, program implementers and the resulting resources. Supporting factors for the successful implementation of the Prosperous Family program, including information on socialization to the community, explanations that are quite clear and understandable from officers and positive interest from the community

Keywords: Analysis, Implementation, Prosperous Family.

A. PENDAHULUAN

Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang dewasa ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatkan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Keluarga Sejahtera merupakan landasan yang kokoh dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga indonesia menuju penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi dan terjadinya degradasi lingkungan, Faturochman dkk (2007:23). Sehingga dengan Program Keluarga Sejahtera diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Latar belakang Permasalahan yang juga ikut mempengaruhi tidak efektifnya program keluarga sejahtera di Desa Sungai Cambai adalah keadaan masyarakat yang tertutup atau

masyarakat yang acuh terhadap penyuluh lapangan keluarga berencana dan kurang peduli terhadap masukan dari pendatang, kaum perempuan di Desa Sungai Cambai mempunyai kebiasaan main kartu sehingga kurang produktif. Serta tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sungai Cambai yang rendah, tingkat pendapatan keluarga yang masih rendah karena mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Cambai pada umumnya hanya mencari ikan dan mencari kayu.

Persoalan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang karena kurang jumlah pegawai seperti petugas penyuluh lapangan keluarga yang hanya berjumlah 14 orang sementara desa binaan di Kabupaten Mesuji ada 105 desa, kurangnya pelatihan-pelatihan khusus serta kurangnya sarana dan prasarana kerja petugas. Sebagai gambarannya, sejak tahun 2011 di Kabupaten Mesuji tidak ada penambahan Petugas lapangan/Penyuluh KB, bahkan cenderung berkurang, karena mutasi alih tugas dan sebagainya.

Untuk menjawab masalah tersebut, pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mesuji, mencanangkan program keluarga sejahtera yang merupakan implementasi dari program keluarga sejahtera yang dijalankan oleh BKKBN secara nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana terurai di muka, fokus penelitian ini adalah implementasi program keluarga sejahtera. Masalah yang akan diteliti antara lain : (1) Bagaimana penerapan program keluarga sejahtera di Kampung KB desa Sungai Cambai; (2) Faktor apa yang mendukung/menghambat implementasi program keluarga sejahtera di Kampung KB desa Sungai Cambai.

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian terhadap implementasi program Keluarga Sejahtera kampung KB Desa Sungai Cambai kebijakan bersifat deskriptif dan eksplanatif dengan tujuan : (1) Meneliti pelaksanaan implementasi program Keluarga Sejahtera di Desa Sungai Cambai; (2) Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Keluarga Sejahtera, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat sehingga menggambarkan dinamika program Keluarga Sejahtera pada dimensi lokal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan

Winarno (2002:14) menyatakan secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang

kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Pasolong (2008:38) menyatakan kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Sedangkan pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita - cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

2. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya

hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2012:32) Implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur – prosedur birokrasi, melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana suatu kebijakan tersebut diperoleh kelompok – kelompok sasaran.

Studi implementasi kebijakan atau analisis implementasi kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas – aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Udoji (1981) dalam Wahab, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dibandingkan proses pembuatan kebijakan, karena suatu kebijakan hanya sekedar susunan peraturan yang sempurna dan hanya tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah jembatan yang menghubungkan antara tindakan – tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Wildavsky (1999:295) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan Van Meter dan Carl Horn, Dalam *"The Policy Implementation Process"* di dalam Jurnal **Administration and Society**, Vol. 5 no. 4 tahun 1975, mendefinisikan implementasi sebagai : " ... policy implementation encompasses those action by publik and privat individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions. This includes both one-time efforts to transform decision into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions" (Van Meter & Van Horn; 1975:447).

Implementasi kebijakan dibatasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu (atau kelompok - kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya. Eugene Bardach dalam bukunya yang berjudul *The Implementation Game : What happen after a bill become a Law?, berpendapat* bahwa proses politik dalam suatu policy tidak berhenti hanya pada saat penyusunannya, tapi juga sampai pada tahap implementasi. Berbagai trik politik berlangsung saat sebuah kebijakan dijalankan, sehingga seringkali tujuan utama dari kebijakan tersebut justru tidak tercapai. Menurutnya sebuah

implementasi adalah suatu permainan tawar-menawar, persuasi, dan manuver di dalam kondisi ketidak-pastian oleh orang - orang dan kelompok - kelompok guna memaksimalkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Hal ini terjadi karena kontrol rasional organisasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya pada kebijakan yang dijalankan oleh berbagai aktor dan institusi, atau dengan kata lain, proses implementasi itu sudah dengan sendirinya berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan kekuasaan diantara para aktor pelaksananya. Permainan yang demikian tentu bisa berakibat tidak sehat bagi implementasi sebuah kebijakan.

Dalam rangka implementasi kebijakan Keluarga Sejahtera, pelaksana atau implementor harus tunduk kepada instruksi – instruksi legal yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Maka dari itu sebelum melaksanakan proses implementasi, pelaksana harus mengetahui dan memahami apa yang harus mereka lakukan. Karena itu ditegaskan bahwa implementasi mengatur kegiatan – kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi, yaitu meliputi: 1) Penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. 2) Organisasi, sebagai unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan. 3) Penerapan, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lain – lainnya.

Jones (1999) menjelaskan dari sudut institusional, organisasi bisa dilihat dari aktor atau badan – badan dalam implementasi program dengan memfokuskan diri pada peranan birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer. Penafsiran terhadap rencana kebijakan ke dalam proses implementasi hanya dilakukan oleh organisasi pemerintah dan pihak – pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan. Suatu program kebijakan akan berhasil bila penafsiran oleh badan – badan eksekutif, birokrat dan beberapa pihak lain yang terlibat apa adanya.

Menurut Grindle (ada dua hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam proses politik dan administrasi, yaitu *contents of policy* dan *contexts of policy*. Adapun dimaksud *content of policy* yaitu kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), tipe manfaat (type of benefits), derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan yang dimaksud *contexts of policy* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Dalam penelitian ini, peneliti

menggabungkan teori faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi yang disampaikan oleh berbagai tokoh diatas, kemudian mengelempokkannya ke dalam dua aspek, yaitu:

- a. Aspek isi kebijakan, yang teridri dari aktor – aktor perumus kebijakan; tujuan dan ukuran kebijakan; luasnya perubahan yang diharapkan dan sumber – sumber kebijakan.
- b. Aspek lingkungan implementasi, yang teridri dari karakteristik organisasi; komunikasi antar organisasi dan intra organisasi; kepatuhan dan daya dukung.

Pengelompokan ke dalam dua aspek diatas dilakukan dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan objek diteliti, yaitu kebijakan Program Keluarga Sejahtera. Hal ini disebabkan dalam implementasi kebijakan Keluarga Sejahtera melibatkan beberapa organisasi pelaksana yang memiliki kepentingan cukup beragam. Sehingga untuk menjelaskan konteks politik dan administrasi dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan program Keluarga Sejahtera, maka penggabungan teori di atas adalah yang tepat untuk mengkaji faktor – faktor organisasi pelaksana yang berpengaruh dalam mempermudah dan menghambat implementasi kebijakan program Keluarga Sejahtera.

4. Konsep Keluarga Sejahtera

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram (Depdiknas, 2001:1011). Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”. (BKKBN,1994:5). Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. Dalam rencana pembangunan nasional memberikan petunjuk bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana persmian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. UU No.10/1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga.

C. METODOLOGI

Penelitian ini terfokus pada kualitatif studi kasus (*case study*), J.W. Creswel (2008:42) menyatakan metode studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Dalam suatu kasus, dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari satu unit,

tetapi merupakan satu kesatuan. Misalnya kasus dapat satu orang, satu komunitas, satu desa, beberapa desa tetapi dalam satu kantor Pemerintahan, dan sebagainya.

Diharapkan dengan metode ini akan ditemukan makna yang tersembunyi dibalik obyek maupun subyek yang akan diteliti. Metode penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) berupaya untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja, melainkan melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam masyarakat (Nawawi, 1994 ; 75).

Pada penelitian ini prosedur pengumpulan data merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang dikumpulkan dan diolah sendiri. Data yang diperlukan adalah data mengenai Implementasi Program Keluarga Sejahtera di Kampung KB Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Yaitu dengan cara memilih informan yang mewakili penyampaian program keluarga sejahtera dari kantor BPKB, antara lain: kepala badan, kepala bidang, dan masyarakat Sungai Cambai yang mewakili kampung tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Sejahtera digulirkan pemerintah Kabupaten Mesuji Sejak 2013. Program Keluarga Sejahtera digulirkan dalam rangka memberikan pembinaan kepada masyarakat desa Sungai Cambai yang masuk dalam kategori pra-keluarga sejahtera. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sungai Cambai. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari digulirkannya program Keluarga Sejahtera antara lain Seluruh warga Desa Sungai Cambai dapat meningkat tingkat kesejahteraannya. Mutu keluarga di desa Sungai Cambai meningkat secara signifikan.

Tahapan pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan pembinaan dan yang terakhir pelaporan hasil. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi dikarenakan pengaruh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual ataupun variabel organisasional. Masing-masing variabel pengaruh tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Sumberdaya merupakan faktor penting agar implementasi kebijakan berlangsung efektif. Hal ini beralasan, pendapat para ahli seperti Van Meter dan Van Horn, Edwards III, Mazmanian dan Sabatier, serta Grindle sepakat bahwa sumberdaya sebagai faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan

hanya akan menjadi wacana dan dokumen saja. Dengan adanya sumberdaya yang memadai kebijakan atau program akan terlaksana dengan tahapan-tahapan yang terorganisir. Kemampuan dan keterampilan dari agen pelaksana juga ikut menentukan keberhasilan suatu program.

Karakteristik agen pelaksana di dalam suatu program hendaknya tegas dan ketat pada aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. Karena itu ketegasan sangat dibutuhkan agar suatu program dapat bergulir sesuai tujuan program. Ketegasan dilakukan bukan dengan hanya peringatan, namun harus diambil langkah penjatuhan sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi lainnya.

Implementor akan melaksanakan program dengan baik apabila adanya sikap yang sama dengan pembuat kebijakan. Saat implementor tidak setuju dengan isi kebijakan, maka implementasi kebijakan atau program menjadi tidak efektif. Sebagaimana menurut Edwards III, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik.

Dalam pengimplementasian suatu program memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara unit pelaksana. Selaras dengan apa yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn, bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program dibandingkan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Sementara itu Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dalam hal ini melihat bahwa Program Keluarga Sejahtera masih menjumpai sejumlah hambatan dalam pengimplementasiannya. Semua itu dapat dilihat dari segi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan implementasi program Keluarga Sejahtera di Kampung KB desa Sungai Cambai antara lain : (1) kurangnya jumlah agen pelaksana di tingkat Desa (2) karakteristik agen pelaksana kurang keras dan ketat terhadap peraturan (3) sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menerima masukan (4) belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana (5) Kondisi sosial ekonomi, rendahnya kesadaran

masyarakat tentang pentingnya kualitas keluarga.

E. KESIMPULAN

Implementasi Program Keluarga di Kampung KB Desa Sungai Cambai Kabupaten Mesuji dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan bahwa dengan adanya Implementasi Program Keluarga Sejahtera di Kampung KB (Keluarga Berencana) Desa Sungai Cambai, telah terjadi perubahan pola pikir masyarakat Desa Sungai Cambai yang tadinya tertutup atau kurang menerima masukan dari orang luar (petugas PEMDA dan pendatang). Kini masyarakat telah menjadi masyarakat yang aktif dalam kegiatan Program Keluarga Sejahtera, antara lain dalam pembinaan BKB (Bina Keluarga Balita), PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) antara lain adalah dengan mengikuti pelatihan pembuatan makanan ringan seperti kue kering dan basah serta pembuatan krupuk mesuji, sulam ulat, pembuatan tikar, atap rumah dan keranjang buah dari lidi pohon nipah.
2. Tahapan pelaksanaan Program Keluarga di Kampung KB Desa Sungai Cambai Kabupaten Mesuji diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuannya mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya. Dimulai dari sosialisasi, pembinaan di lapangan, dan pelaporan. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih ditemukan sejumlah ketidakberhasilan diantaranya kurangnya perhatian pelaksana, informasi tidak serempak dan merata, koordinasi antar pelaksana kurang optimal.
3. Faktor penghambat keberhasilan kebijakan program Keluarga Sejahtera di antaranya sumberdaya manusia kurang memadai, anantara lain adalah petugas penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) masih kurang menjangkau wilayah desa binaan karena petugas PLKB hanya 14 orang sementara desa binaan di kabupaten mesuji ada 105 desa. Serta jarak tempuh desa yang jauh, serta kondisi jalan yang kurang mendukung.
4. Faktor pendukung keberhasilan implementasi Program Keluarga Sejahtera, di antaranya informasi sosialisasi sampai kepada masyarakat, penjelasan yang cukup jelas dan dimengerti dari petugas serta animo positif dari masyarakat. Disamping itu Program Keluarga Sejahtera memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sungai Cambai, sesuai dengan teori Grindle bahwa ada dua hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, E. (1977). *The implementation game: what happens after a bill becomes a law*. Michigan: MIT Press.
- Bungin Burhan, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Creswell, J.W.(2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qulitative Research*. Jersey: Pretince Hall
- Ekowati, M. R. (2004). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Horn, V. M. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration and Society, Vol. 5 No. 4* , 447.
- Jones, C. (1999). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2003, Jakarta: Balai Pustaka
- Kumorotomo Wahyudi, 2013, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1992). *Studi Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Laporan penelitian pada jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.